

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan di skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya di Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan identitas dari masyarakat Aceh dan desakan dari lembaga pembela HAM yang peduli terhadap isu pengungsi Rohingya baik dari internal Indonesia maupun luar Indonesia.

Pertama, Indonesia menerima pengungsi Rohingya di daratan diwakili oleh masyarakat Aceh melalui para nelayan yang melakukan aksi heroik menyelamatkan pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia. Nelayan Aceh yang sempat dilarang untuk melakukan penjemputan terhadap pengungsi Rohingya oleh TNI AL Indonesia tetap menolong pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia pada 14 Mei 2015 dini hari. Pada tanggal 14 Mei 2015 dini hari nelayan Aceh yang sedang melaut menyelamatkan sekitar 780 pengungsi Rohingya dan dibawa ke daratan Langsa, Aceh. Aksi penyelamatan ini disambut baik oleh masyarakat Aceh yang mayoritas penduduknya Islam. Masyarakat Aceh merasa pengungsi Rohingya merupakan saudara seiman yang harus diselamatkan dari berbagai bahaya, baik diskriminasi, perlakuan tidak baik dari pemerintah Myanmar dan penolakan pengungsi Rohingya ke negara-negara berdaulat di Asia Tenggara. Sebelum ditemukan terdampar di perairan Indonesia, pengungsi Rohingya yang melakukan eksodus dengan menumpang kapal

perdagangan manusia yang mengarah ke Malaysia di tolak kehadirannya oleh Thailand, Malaysia dan Indonesia melalui tentara lautnya.

Peristiwa penyelamatan pengungsi Rohingya oleh masyarakat Aceh ini menjadi perhatian baru media internasional setelah sebelumnya menyoroti tindakan tidak empati yang dilakukan oleh Thailand dengan menolak kedatangan pengungsi Rohingya di daratan Thailand serta penolakan Malaysia dan Indonesia. Melalui media beberapa organisasi peduli HAM dan isu Rohingya menyayangkan sikap dari negara-negara Asia Tenggara yang terkesan lambat dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi. Namun dilain sisi media mengapresiasi sikap masyarakat Aceh. Sebagai wilayah yang diberi otoritas untuk menggunakan SI dalam pelaksanaan sistem dan budayanya sehari-hari, masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan terhadap sesama muslim. Oleh karenanya masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh dengan tangan terbuka membantu dan menyelamatkan pengungsi Rohingya yang terdampa di perairan Indonesia.

Kedua, isu Rohingya menjadi sorotan dunia internasional berapa tahun terakhir semenjak konflik horizontal yang pecah pada tahun 2012 di Negara Bagian Rakhine, Myanmar akibat peristiwa pemerkosaan gadis Rakhine oleh pemuda Rohingya. Dari adanya peristiwa itu terciptalah gelombang besar eksodus Rohingya ke negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia. Eksodus merupakan perpindahan masal yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk dengan meninggalkan kampung halaman untuk mencari mencari kehidupan yang lebih baik. Eksodus ini dilakukan oleh etnis Rohingya dengan

menumpang kapal perdagangan manusia yang mengarah ke Malaysia. Namun sebelum sampai di Malaysia, para pengungsi ditiggalkan oleh perusahaan kapal yang membawanya di tengah laut dan terdampar di Thailand, jauh dari bayangan Thailand menolak kehadiran pengungsi Rohingya dan menyeret kembali kapal yang berhasil menepi ke daratan Thailand untuk ke tengah laut. Hal tersebut juga dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia melalui tentara lautnya, hingga setelah media menyorot perbuatan ketiga negara ini dan menetapkan eksodus Rohingya menjadi krisis kemanusiaan yang paling buruk dalam sejarah Asia Tenggara serta diterimanya pengungsi Rohingya oleh masyarakat Aceh di Langsa.

Pada 20 Mei 2015, ketiga negara ini bersedia melakukan pertemuan tingkat menteri di Pataraja, Malaysia. Pertemuan ini diinisiasi oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN pada periode ini, pertemuan ini dihadiri oleh MenLu dari Thailand, Malaysia dan Indonesia sebagai negara yang terkena dampak langsung dari adanya peristiwa eksodus etnis Rohingya. Sebenarnya pertemuan ini juga mengundang Myanmar ebagai negara yang paling bertanggung jawab namun Myanmar menolak datang jika membahas masalah Rohingya. Dalam pertemuan ini membicarakan solusi dan strategi dalam menangani imigran gelap dari Rohingya yang berada di kedaulatan ketiga negara. Pada akhir pertemuan Indonesia dan Malaysia bersedia menerima pengungsi Rohingya yang melakukan eksodus dan masih berada di laut. Setelah keputusan dalam pertemuan tripartit itu Indonesia melalui TNI AL melakukan pencaian terhadap pengungsi Rohingya yang masih terapung-apung di lautan. Bahkan instruksi itu diberika langsung dari Presiden Jokowi Dodo.

Kebersediaan Indonesia dalam menangani dan menerima pengungsi di Indonesia khususnya di Aceh setelah sebelumnya menolak kedatangan pengungsi dikarenakan oleh desakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang tergabung dalam AMPR, pemerintah Aceh dan juga organisasi peduli HAM, imigran dan isu Rohingya seperti UNHCR, IOM. Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo tidak hanya mementingkan kepentingan politik saja oleh karena desakan yang dilakukan oleh masyarakat internasional Indonesia mengubah kebijakan terhadap pengungsi Rohingya di Nangroe Aceh Darussalam dengan alasan kemanusiaan.